

ABSTRAKSI SKRIPSI

PT "X" merupakan cabang dari PT. Astra internasional yang bergerak dalam bidang jasa otomotif. Hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang berbentuk sentralisasi yang berarti segala sesuatu yang akan dilakukan oleh kantor cabang harus atas sepengetahuan kantor pusat, kecuali hal-hal yang bersifat reguler. Badan usaha "X" tidak mempekerjakan karyawan yang dibayar secara harian, semuanya dibayar secara bulanan. Untuk pelaksanaan penggajian badan usaha "X" ditangani oleh satu bagian yaitu bagian administrasi, sedangkan untuk pengambilan gaji karyawan tidak dilakukan melalui kasir badan usaha melainkan melalui rekening bank masing-masing di mana bank tersebut telah ditentukan oleh badan usaha dapat diambil melalui fasilitas bank tersebut yaitu ATM.

Dalam siklus penggajian badan usaha terdapat beberapa problematika, yaitu adanya penggabungan fungsi antara personalia, administrasi, dan keuangan di mana wewenang serta tugas dipegang oleh personil yang sama yaitu kepala administrasi; tidak dilakukan pencocokan tanda-tangan pada tanda bukti penerimaan gaji dengan tanda-tangan pada catatan data karyawan pada saat pendistribusian slip gaji; slip gaji untuk karyawan tidak diperiksa oleh kepala cabang, melainkan langsung ditangani oleh kepala administrasi; bukti pengeluaran tidak bernomor urut secara tercetak. Hal-hal yang telah disebutkan diatas dapat memberikan peluang terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan badan usaha, serta memudahkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi.

Sehubungan dengan hal itu maka diperlukan suatu pengujian kepatuhan untuk menilai efektifitas struktur pengendalian internal khususnya mengenai siklus penggajian badan usaha serta untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen telah dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Dari hasil evaluasi akhir secara keseluruhan aplikasi *compliance audit* menunjukkan bahwa struktur pengendalian internal atas siklus penggajian badan usaha telah cukup memadai dan efektif serta dapat diandalkan, walaupun masih terdapat kelemahan seperti yang telah disebutkan diatas.

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dengan adanya penyimpangan struktur pengendalian internal yaitu sebaiknya badan usaha melakukan pemisahan fungsi antara fungsi personalia, keuangan dan administrasi, walaupun badan usaha hanya perpanjangan tangan dari kantor pusat. Sebaiknya badan usaha melakukan pencocokan tanda-tangan pada slip gaji yang diambil dan hendaknya kepala cabang melakukan recheck atas slip gaji yang dikirim dengan bagian administrasi. Dan untuk bukti pengeluaran sebaiknya dicetak secara *pre-numbered*. Rekomendasi ini diberikan agar badan usaha terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian atas penyalahgunaan wewenang yang ada.